

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Badruzaman, Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. (Bandung: Alumni, 1993).
- Bakri, Muhammad. *Hak Menguasai Tanah oleh Negara: Paradigma Baru untuk Reforma Agraria*. (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011).
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya*. Cetakan ke-4. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).
- Djaja, Benny. *Perjanjian Kawin: Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2020).
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Ed.rev. Cetakan ke-9. (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003).
- Hutagalung, Arie. *Program Retribusi Tanah di Indonesia: Suatu Sarana Ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan dan Pemilihan Hak Atas Tanah*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Rajawali, 1985).
- Marilang. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. (Makassar: Indonesia Prime, 2017).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2010).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Patrik, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang*. (Bandung: Mandar Maju, 1994).
- Perangin, Effendy. *Mencegah Sengketa Tanah: Membeli, Mewaris, Menyewakan, dan Menjaminkan Tanah Secara Aman*. (Jakarta: Rajawali, 1986).

- Pikahulan, Rustam Magun. *Hukum Perikatan*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019).
- Rusli, Hardijan. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993).
- Sihombing, B.F. *Sistem Hukum PPAT dalam Hukum Tanah Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2019).
- Sinaga, Sahat HMT. *Jual Beli Tanah dan Pencatatan Peralihan Hak*. (Bandung: Pustaka Sutra, 2007).
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan ke-29. (Bandung: Intermasa, 2001).
- Santoso, Urip. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana, 2015).
- \_\_\_\_\_. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Cetakan ke-6. (Jakarta: Kencana, 2016).
- \_\_\_\_\_. *Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Kencana, 2017).
- \_\_\_\_\_. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Cetakan ke-6. (Jakarta: Kencana, 2019).
- Sumardjono, Maria S. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press, 2016).
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat terjadi Perceraian*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Visimedia, 2008).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1981).
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-16. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).
- Syarief, Elza. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014).

Tehupeiory, Aartjie. *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012).

Utomo, Hatta Isnaini. *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. (Jakarta: Prenada Media, 2020).

Zen, A.Patra M dan Daniel Hutagalung (ed). *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2403)*.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)*.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)*.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050)*.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)*.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik*

*Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.*

\_\_\_\_\_. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.*

Subekti, R. dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Cetakan ke-35. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).

### **C. Putusan**

Indonesia. *Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Lbt.*

### **D. Artikel Jurnal**

Ahyani, Sri. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. *Jurnal Wawasan Yuridika*. (Volume II, Nomor 1, 2020).

Djuniarti, Evi. “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPerduta”. *Jurnal De Jure*. (Volume XVII, Nomor 4, 2007).

Hutagalung, Arie S. dan Suparjo Sujadi. “Pembeli Beritikad Baik Dalam Konteks Jual Beli Menurut Ketentuan Hukum Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. (Volume XXXV, Nomor 1, 2005).

- Rasyid, Laila M. “Penerapan Norma Adat Terang Dan Tunai Dalam Praktek Peradilan Perdata (Kajian Putusan Pengadilan Nomor: 23/Pdt.G/2013/PN.Bj). *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*. (Volume VII, Nomor 2, 2019).
- Rondonuwu, Giovanni, “Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”. *Jurnal Lex Privattum*. (Volume V, Nomor 4, 2017).
- Saranaung, Frederik Mayore . “Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997”. *Jurnal Lex Crimen*. (Volume V, Nomor 1, 2017).
- Santoso, Urip. “Jual Beli Tanah Hak Milik Yang Bertanda Bukti Petuk Pajak Bumi (kutipan Letter C)”. *Jurnal Perspektif*. (Volume XVII, Nomor 2, 2012).
- Satrianingsih, Ni Nyoman Putri dan A.A. Ngurah Wirasila. “Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Perjanjian Jual Beli di Bawah Tangan”, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Suryandari, Ratri Puspita, et al. “Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat-Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Oleh Notaris”. *Jurnal Notarius*. (Volume XIII, Nomor 2, 2020).

#### **E. Website**

- Darussalam, Retno S. “Suami Menjual Tanah Milik Bersama”. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 19 September 2020.
- Marthasari, Niken Eka. “Tahapan Jual-Beli Tanah”. [www.smartlegal.id](http://www.smartlegal.id), 5 Agustus 2020.
- Nayara, “Keberlakuan Putusan MK tentang Perjanjian Kawin terhadap Perkawinan Warga Negara Indonesia”. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 19 September 2020.
- Pokrol, Si. “Sengketa Tanah”. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 19 September 2020.

## **F. Kamus**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-2. (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).

## **G. Wawancara**

Peneliti. *Wawancara*. dengan Agustinus Payong Dosi, S.H., M.H, selaku Advokat. (Daring: *email*, 13 Oktober 2020).

Peneliti. *Wawancara*. dengan Abu Tafsir, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT Kota Administrasi Jakarta Barat. (Jakarta: Kantor Notaris-PPAT H.Abu Tafsir, S.H., M.Kn., 15 Oktober 2020).

Peneliti. *Wawancara*. dengan Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn., selaku Dosen Universitas Parahyangan/Notaris dan PPAT Kabupaten Garut, Jawa Barat. (Daring: *Google Meet*, 17 Oktober 2020).

Peneliti. *Wawancara*. dengan Suwarni Sukiman, S.H., selaku Notaris dan PPAT Kota Administrasi Jakarta Barat, (Jakarta: Kantor Notaris & PPAT Suwarni Sukiman, S.H., 19 Oktober 2020).

Peneliti. *Wawancara*. dengan Berny Christian Limahelu, S.H., selaku Advokat. (Jakarta: Kantor Advokat Berny Christian Limahelu & Partners, 09 November 2020).

Peneliti. *Wawancara*. dengan Siti Rasa, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT Kota Tangerang. (Kota Tangerang: Kantor Notaris & PPAT Kota Tangerang, 17 November 2020).